

**KEBIJAKAN SOSIAL LORONG WISATA BAGI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
DI KOTA MAKASSAR**

***SOCIAL POLICY OF LORONG WISATA FOR IMPROVING
THE WELFARE OF THE POOR IN MAKASSAR CITY***

**PRATIWI WULANDARI
E032221006**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**KEBIJAKAN SOSIAL LORONG WISATA BAGI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA
MAKASSAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh:

**PRATIWI WULANDARI
E032221006**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
KEBIJAKAN SOSIAL LORONG WISATA BAGI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

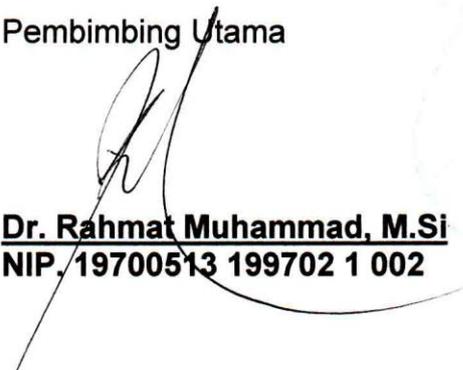
PRATIWI WULANDARI

E032221006

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **01 Maret 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
NIP. 19700513 199702 1 002

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,


Dr. Sakaria To Anwar, M.Si
NIP. 19690130 200604 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
NIP. 19651016 199002 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratiwi Wulandari

NIM : E032221006

Program Studi : Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Maret 2024



Pratiwi Wulandari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penghulu sekian manusia, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia.

Kepada keluarga, Muhammad Said selaku bapak dari penulis, Rahmawati selaku ibu dari penulis, Kiki Rezky Amanda selaku kakak dari penulis, Yuliastri Maulani dan Muh. Ariel Reza Perdana selaku adik dari penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil dan motivasi yang tidak putus-putusnya, terimakasih yang tak terhingga atas pengertian yang telah diberikan selama ini.

Terimakasih kepada Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. dan Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih kepada Prof. Hasbi Marissangan, M.Si.,Ph.D., Dr. Sawedi Muhammad, M.Sc., dan Dr. H. Tautoto Tanaranggina, M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini. Kepada seluruh jajaran dosen dan pegawai Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Magister Sosiologi Angkatan 2022-1, pengurus Forum Mahasiswa Magister Sosiologi (FORMASI), dan terkhusus kepada teman-teman "*Genk LPPM*" yang selalu

menjadi tempat penulis mencurahkan isi hati dan isi kepala. Kepada seluruh informan dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih.

Dalam tesis ini tentunya masih ditemui berbagai kelemahan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan kritik dari berbagai pihak, demi tercapainya kualitas penelitian yang lebih baik di masa mendatang. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu sosiologi, untuk pemerhati masalah sosial, dan masyarakat pada umumnya yang tertarik dengan kajian kebijakan sosial, kemiskinan dan aspek yang terkait di dalamnya.

Makassar, 01 Maret 2024



Pratiwi Wulandari

ABSTRAK

PRATIWI WULANDARI. *Kebijakan Sosial Lorong Wisata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Makassar* (dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Muh. Iqbal Latief).

Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi diseluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Selama ini, pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Program pengentasan kemiskinan dapat berhasil jika ada masyarakat yang terlibat di dalam program tersebut. Salah satu program pengentasan kemiskinan di Makassar adalah Program Lorong Wisata yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sosial dan dampak program Lorong wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan bentuk partisipasi dalam program lorong wisata (longwis). Penelitian ini dilakukan di Lorong *Maastrich* dan Lorong *Sipakatau*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kalangan pemerintah setempat dan masyarakat yang tinggal di kedua lorong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan 1) Kebijakan sosial lorong wisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih memperlihatkan adanya perbedaan antara lorong wisata yang sudah maju dan Lorong wisata yang belum berkembang. 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah diterapkannya program lorong wisata, memiliki perwujudan kebijakan sosial yang berbeda. Pada lorong *Maastrich* perwujudan dari adanya kebijakan sosial program lorong wisata mencakup peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan pada lorong *sipakatau*, perwujudan dari kebijakan sosial program lorong wisata hanya pada aspek kesehatan saja. 3) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program lorong wisata tidak ditemukan (terlihat) karena kebijakan ini sifatnya *top-down*. Masyarakat hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan dan pemanfaat program ini. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat di kedua lorong ini cukup beragam, mulai dari pikiran, tenaga, uang, hingga material. Karena itu, disarankan agar pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan sosial harus berbasis pada masyarakat lorong mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemanfaatan termasuk tahap evaluasi.

Kata Kunci : *Kebijakan Sosial, Lorong Wisata, Kesejahteraan Masyarakat.*



ABSTRACT

PRATIWI WULANDARI. *Social Policy of Lorong Wisata in Improving the Welfare of the Poor in Makassar City* (supervised by Rahmat Muhammad and Muh. Iqbal Latief).

Poverty is a social phenomenon that occurs in all parts of the world, including Indonesia. So far, the Indonesian government both at the central and regional levels has had many programs to alleviate existing poverty. Poverty alleviation programs can be successful if there are people involved in the program. One of the poverty alleviation programs in Makassar is the *Lorong Wisata* Program which has been implemented since 2021. This research aims to analyze the social policy and impact of the *Lorong wisata* program in improving the welfare of the poor and the form of participation in the *lorong wisata (longwis)* program. This research was conducted in *Lorong Maastrich* and *Lorong Sipakatau*. The informants in this study consisted of local government and the people living in the two alleys. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, in-depth interviews and documentation. The results of the study found 1) The social policy of tourist aisles in improving community welfare still shows differences between developed *Lorong wisata* and undeveloped *Lorong wisata*. 2) Improving the welfare of the community after the implementation of the *Lorong Wisata* program, has a different manifestation of social policy. In *Lorong Maastrich*, the embodiment of the social policy of the *Lorong wisata* program includes economic improvement, education, and health. While in *Lorong Sipakatau*, the embodiment of the social policy of the *Lorong Wisata* program is only in the health aspect. 3) Community participation in the planning stage of the *lorong wisata* program was not found (visible) because this policy is top-down. The community is only involved during the implementation and utilization of this program. In addition, the forms of community participation in these two alleys are quite diverse, ranging from thoughts, energy, money, to materials. Therefore, it is recommended that the city government in formulating social policies should be based on the hallway community from the planning stage to the utilization stage including the evaluation stage.

Keywords : *Social Policy, Lorong Wisata, Community Welfare.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian tentang Kampung Kota dan Lorong Wisata	8
B. Kajian tentang Kemiskinan di Kota Makassar	16
C. Tinjauan tentang Kebijakan Sosial dalam Perspektif Sosiologi	24
D. Teori yang relevan	30
E. Penelitian Terdahulu	42
F. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Dasar dan Tipe Penelitian	50
C. Informan Penelitian	50

D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	55
BAB IV GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN.....	57
A. Kondisi Umum Kecamatan Makassar	57
1. Kondisi Umum Kelurahan Bara-Baraya	58
2. Kondisi Umum Kelurahan Maccini Gusung	58
B. Kondisi Fisik Lorong <i>Maastrich</i> dan Lorong <i>Sipakatau</i>	59
C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lorong <i>Maastrich</i> dan Lorong <i>Sipakatau</i>	63
D. Latar Belakang Program Lorong Wisata	69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Informan Penelitian	74
B. Hasil Penelitian	78
C. Pembahasan	102
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Matrix Penelitian Terdahulu.....	44
Table 4.1 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Lorong	64
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Usia 15 tahun keatas	66
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk	67
Tabel 5.1 Karakteristik Informan Penelitian	77
Tabel 5.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Lorong dalam Tahap Pelaksanaan Program Lorong Wisata	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konsep	48
Gambar 4.1 Kondisi Fisik Lorong	60
Gambar 5.1 Hasil Pemanfaatan Lorong Wisata	102

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	122
Lampiran 2. Dokumentasi	126
Lampiran 3. Persuratan	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi diseluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan mengenai kemiskinan tidak kunjung selesai, sehingga kemiskinan terus menjadi tema menarik untuk dikaji dan didalami (Nursalam, 2012). Selama ini, pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada, meskipun beberapa kali mengalami penurunan angka tetapi masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup kompleks untuk diselesaikan (Royat, 2015). Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain jumlah penduduk, pengangguran, PDRB, dan pendidikan (Damanik dan Sidauruh, 2020).

Jumlah penduduk yang meningkat menjadi salah satu faktor kemiskinan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini di karenakan kota merupakan lambang peradaban kehidupan manusia, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kebudayaan, dan sarana untuk peningkatan kualitas hidup (Daldjoeni dalam Kahfi, 2017). Salah satu kota yang terkena imbas dari jumlah penduduk yang meningkat adalah Kota Makassar. Meskipun dalam 10 tahun terakhir ini Kota Makassar memperlihatkan sejumlah inovasi, tetapi kemiskinan juga masih menjadi masalah utama yang ada di masa kepemimpinan Mohammad

Ramdhan Pomanto atau yang biasa dipanggil Danny Pomanto sebagai Walikota.

Mayoritas masyarakat kota Makassar tinggal atau bermukim di kawasan lorong. Lorong sangat identik dengan permukiman kumuh di perkotaan karena pada umumnya dibangun secara swadaya atau mandiri oleh para migran dari pedesaan, sehingga dikenal juga dengan istilah “kampung kota” (Bakti, 2010). Kampung kota adalah sebuah daerah khusus di perkotaan yang memiliki karakteristik kampung, seperti dihuni oleh masyarakat yang berasal dari daerah yang sama, rumah yang berdempetan tidak teratur dan tidak mempunyai halaman, bangunan non-permanen, jalan yang berupa gang-gang sempit, dan hubungan sosial antara penduduk di dalamnya yang sangat dekat (Harnoko, 1992).

Di Kota Makassar terdapat sekitar 7.250 lorong, melihat jumlah lorong yang terbilang cukup besar, Walikota akhirnya melihat peluang untuk dapat memajukan masyarakat-masyarakat yang tinggal dilorong dengan membuat kebijakan untuk mengembangkan lorong yang dulunya kumuh, sekadar tempat tinggal, sekarang sudah bisa menjadi destinasi, jadi spot foto, kunjungan dan tempat wisata dan bisa menjadi lahan peningkatan ekonomi untuk masyarakat (Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), (<https://makassar.tribunnews.com/2022/02/21/asal-mula-program-lorong-wisata-di-makassar-simak-penjelasan-kadis-dkp-makassar-muhammad-rheza>).

Sebelum pemerintah Kota Makassar melakukan pembenahan di kawasan kumuh perkotaan, terlebih dahulu sudah pernah dilakukan di Kota Bandung, namanya adalah Program Kampung Kreatif yang tepatnya berada Kampung Dago Pojok (Wardhani et al., 2016). Program Kampung Kreatif merupakan salah satu contoh usaha perbaikan kampung. Kampung yang dahulu kumuh, kini dikenal sebagai kampung kreatif. Dalam penataan kampung ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam rangka memajukan kampungnya. Masyarakat sendiri yang menata koridor jalan dan gang dengan lukisan-lukisan mural dan menyediakan akomodasi wisata bagi wisatawan. Masyarakat juga membuka pelatihan seni tari, pencak silat, dan melukis bagi wisatawan. Keberhasilan Kampung Dago Pojok menjadi kampung kreatif disebabkan karena peran aktif para pelaku (*stakeholder*), yaitu pelaku utama (warga Kampung Dago Pojok), pelaku pendukung (berbagai komunitas kreatif masyarakat), dan pelaku kepentingan kunci (pemerintah daerah, LSM, dan pihak swasta).

Penataan perkotaan di Makassar sendiri, Walikota lakukan melalui Program Lorong *Garden* atau yang biasa disebut *Longgar* yang dibuat pada periode pertamanya. Program *Longgar* ini menata dan mempercantik kawasan fisik lorong dengan tanaman produktif dan berbagai fasilitas umum penunjang seperti penerangan, bak sampah, taman-taman, dan pot tanaman bunga (Kahfi, 2017). Pada periode keduanya, Walikota Makassar tetap menjadikan “Lorong” sebagai

kekuatannya dalam penataan kota demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Di periode kedua ini Walikota Makassar mengeluarkan Program unggulannya yaitu “Lorong Wisata”

Program Lorong Wisata dihadirkan sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Lorong wisata ini adalah *upgrading* dari lorong *garden* dan badan usaha lorong karena didalam Program Lorong Wisata ini dapat dilihat adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota agar masyarakat Kota Makassar dapat mandiri dalam perputaran ekonomi. Dari 7.250 jumlah lorong yang ada di Kota Makassar, ada 5.000 lorong yang akan dijadikan sasaran Program Lorong Wisata, hingga Mei 2023 sudah ada sejumlah 1.846 lorong yang sudah dijadikan Lorong Wisata di Kota Makassar (Data Dinas Parawisata Kota Makassar, 2023).

Di kutip dari Antara News, Kepala Dinas Parawisata M. Roem menyatakan bahwa, tujuan dari lorong wisata adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, apalagi setelah hampir dua tahun ini ekonomi merosot karena pandemi. Konsep lorong wisata yakni penataan lorong secara estetik dengan ciri khas masing-masing yang kemudian diberikan peluang usaha. Salah satu tujuan dari pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) setiap lorong wisata itu agar terjadi perputaran ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (<https://makassar.antaranews.com/berita/313729/lorong-wisata-makassar-mulai-dijalankan-pada-awal-november-2021>)

Sejauh ini gagasan terkait Program Lorong Wisata di Kota Makassar telah menjadi daya wisata yang menjanjikan. Namun, keberadaan lorong wisata ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang tinggal di dalam lorong. Masyarakat miskin yang tinggal di lorong masih menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan minimnya akses terhadap fasilitas publik. Sementara itu, kebijakan pemerintah terkait pengembangan dan pengelolaan lorong belum sepenuhnya memperhatikan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terkait kebijakan sosial yang dapat diimplementasikan melalui pengembangan lorong di Kota Makassar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang tinggal di dalamnya. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat miskin di Kota Makassar. Dengan demikian, pengembangan lorong wisata di Kota Makassar dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain itu, dari berbagai kajian ataupun studi yang terkait dengan lorong wisata, belum satupun yang secara spesifik meneliti tentang bagaimana kebijakan sosial lorong wisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Makassar, dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalamnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Kebijakan Sosial Lorong Wisata bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kota Makassar”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Sosial dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar dalam perspektif sosiologi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Kebijakan Sosial Lorong Wisata dan dampaknya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Makassar ?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam program Lorong Wisata ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan Kebijakan Sosial Lorong Wisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program Lorong Wisata.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan yang bersifat teoritik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis untuk perumusan kebijakan yang terurai sebagai berikut.

Manfaat teoritis penelitian ini antara lain :

- a. Memperkaya kajian ilmu sosiologi pada umumnya dan kajian terkait Kebijakan sosial dalam perspektif sosiologi pembangunan pada khususnya.
- b. Memperkaya kajian tentang kesejahteraan sosial masyarakat terkhusus pada masyarakat miskin .

Manfaat praktis :

- a. Bagi pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini dapat menjadi saran dalam membuat kebijakan terkhusus pada kebijakan sosial terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kampung Kota dan Lorong Wisata

1. Kajian tentang Kampung Kota

Herlianto dalam (Widjaja, 2013) menyatakan bahwa kampung kota merupakan daerah di dalam kota yang telah mengalami transisi dari kehidupan desa ke kota, dari agraris ke spesialis, dari tradisional ke modern, dan dari hubungan gotong royong ke sifat birokrasi.

Sujarto (1980) menjelaskan bahwa kampung kota merupakan suatu lingkungan tempat tinggal yang berkepadatan tinggi, terdiri atas kumpulan rumah dengan konstruksi bangunan temporer semi permanen, tanpa halaman cukup, serta prasarana fisik lingkungan yang kurang memadai. Lingkungan tempat tinggal ini umumnya dikelilingi oleh deretan-deretan bangunan permanen.

Yudohusodo (1991) mendefinisikan kampung kota yang merujuk pada tinjauan kondisi umum masyarakat penghuninya, ia menjelaskan bahwa kampung kota merupakan lingkungan suatu masyarakat yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah yang pada umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup, baik dari jumlahnya maupun kualitasnya.

Rutz (1987) juga menjelaskan bahwa kampung kota merupakan kawasan hunian masyarakat berpendapatan rendah yang kondisi fisiknya kurang baik.

Yudohusodo (1991) (dalam Widjaja, 2013) mengelompokkan ciri-ciri kampung kota menjadi lima tipe, ditinjau berdasarkan lokasinya dalam wilayah geografis kota, yaitu :

1. Kampung kota yang berada pada lokasi yang sangat strategis dalam mendukung fungsi kota. Untuk lokasi ini, masyarakat dapat saja memperbaiki kondisi lingkungannya dengan biaya sendiri dengan biaya sendiri dengan memanfaatkan strategisnya lokasi.
2. Kampung kota yang lokasinya kurang strategis dalam mendukung fungsi kota dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota.
3. Kampung kota yang lokasinya tidak strategis dan menurut rencana tata kota hanya boleh dibangun untuk perumahan.
4. Kampung kota yang berada pada lokasi yang menurut rencana kota tidak diperuntukkan bagi perumahan.
5. Kampung kota yang berada pada lokasi yang berbahaya seperti bantaran sungai, jalur rel kereta dan jalur listrik tegangan tinggi.

Kampung kota dicirikan dengan perilaku penduduknya masih seperti di pedesaan dengan ikatan kekeluargaan yang erat, ketidakteraturan dan kerapatan permukiman, penduduk padat, sarana dan prasarana yang kurang seperti air bersih, pembuangan sampah, dan saluran air limbah (Bakti, 2010; Sumintarsih & Adrianto, 2014).

Kampung kota banyak dituding sebagai sumber berbagai masalah sosial yang muncul di perkotaan, seperti kemiskinan, tawuran, dan kriminalitas (Sumintarsih & Adrianto, 2014).

Lingkungan fisik kampung kota pada umumnya terbentuk secara alamiah dan tidak terencana dimana aturan-aturan formal dalam proses pembangunan lingkungan permukiman tidak dihiraukan. Hampir sebagian besar proses pembangunan yang terjadi di kampung kota dilakukan secara *self-organized* berdasarkan kepentingan-kepentingan individual dan kesepakatan-kesepakatan sosial yang terjalin di antara para warganya sendiri. Pertumbuhannya yang tidak terencana ini mengakibatkan penampilan fisiknya pun tidak teratur dan terurus (Widjaja, 2013).

Lingkungan sosial masyarakat kampung kota, ikatan bertetangga tampaknya menjadi jauh lebih penting daripada ikatan kekerabatan. Ikatan terhadap tempat tinggal, juga jauh lebih penting dari sekedar ikatan keluarga (Jellinek, 1991). Ikatan tempat tinggal ini dibangun berdasarkan jaringan-jaringan ketetanggaan, yang jelas terlihat pada rumah-rumah dengan jendela menghadap ke jalan yang sama. Hakekat yang lebih mendalam dari ikatan sosial antar penduduk kampung kota, sebenarnya adalah kegiatan sektor informal yang menjadi sumber pendapatan kebanyakan penduduk kampung kota dan disisi lain adalah mempertahankan secara bersama-sama tempat

tinggalnya dari upaya pembongkaran oleh pemerintah atau pihak-pihak lainnya (Murray, 1991 & Jellinek, 1991).

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya, maka perkembangan Kota Makassar yang berintikan kebudayaan dan masyarakat Bugis-Makassar, bermula dari corak kehidupan kampung pedesaan (*rural*), yang kemudian berkembang menuju arah corak kehidupan perkotaan (*urban*). Eksistensi kampung menjadi lingkungan pemukiman perkotaan di Kota Makassar dengan segala perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi hingga mencapai bentuknya seperti yang dapat kita lihat sampai hari ini adalah suatu proses panjang seiring dinamika perkembangan kotanya. Perkembangan dan citra kota Makassar tidak lepas dari permasalahan dan eksistensi kampung kota ini.

2. Program Lorong Wisata

Program Lorong Wisata adalah salah satu program prioritas dan unggulan Walikota Makassar sejak tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang turun sejak menyebarnya virus covid-19. Pelaksanaan Program ini tertuang dalam dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata belum dapat menampung kebutuhan dan perkembangan hukum. Peraturan ini memuat definisi program Lorong Wisata, Agen yang diberikan

kekuasaan untuk terlibat dalam pembentukan Lorong Wisata hingga Sumber Pembiayaan Lorong Wisata ini.

Lorong Wisata dalam PERWALI Nomor 94 Tahun 2022 didefinisikan sebagai Lorong yang dapat menjadi daerah kunjungan wisata yang memiliki infrastruktur yang baik, lingkungan asri, indah, bersih, hijau, dan menarik serta terdapat perputaran ekonomi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian warga tersebut. Lorong Wisata ini ditentukan oleh pihak Kecamatan berdasarkan usulan dari kelurahan melalui koordinasi bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW setempat, setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama tim ahli perangkat daerah setempat dan/atau tim ahli Walikota Makassar sebelum ditetapkan menjadi Lorong Wisata.

Pelaksanaan Program Pembentukan Lorong Wisata melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan BUMD, juga melibatkan Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan, Badan/Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Non-Governmental Organization*, dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan seperti TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, Kader Posyandu, RT (Rukun Tetangga), dan RW (Rukun Warga). Selain itu, adapula pembentukan Dewan Lorong untuk setiap Lorong Wisata sebagai unsur masyarakat yang

berdomisili di lorong untuk setiap Lorong Wisata sebagai unsur masyarakat yang berdomisili di dalam lorong yang ditetapkan oleh Camat dengan fungsi memberdayakan Lorong di wilayahnya. Mereka adalah agen-agen pemerintah menjadi aktor dengan kekuasaan membentuk dan memberdayakan Lorong Wisata sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dewan Lorong mempunyai tugas menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi Lorong Wisata kepada masyarakat, melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan Lorong Wisata, melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan serta *stakeholder* terkait dalam pengembangan Lorong Wisata. Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan untuk BUMD berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Perguruan tinggi/ Lembaga Pendidikan memiliki tugas dan peran dalam mendorong, membimbing, dan membantu dalam pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dengan menggandeng beberapa *stakeholder* terkait, juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Analisa terkait perencanaan desain Lorong Wisata berdasarkan karakteristik dan potensi Lorong di masing-masing lingkungan/Kelurahan.

Badan/Lembaga Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan dan pendampingan untuk optimalisasi program

Pembentukan Lorong Wisata sesuai mekanisme dan prosedur serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan CSR agar berkontribusi kepada masyarakat, dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menitikberatkan CSR pada lingkungan Lorong Wisata binaan. Kedua untuk pelaksanaan tersebut dibawah koordinasi dan arahan forum CSR daerah.

Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah terdiri dari TP PKK, LPM, Karang Taruna, Kader Posyandu, RT dan RW. Mereka bertugas sebagai pendukung pelaksanaan program Lorong Wisata bersesuaian dengan program kelembagaan masing-masing dan program yang ada di Lorong Wisata. Selain itu, ada juga Organisasi Kemasyarakatan sebagai pendukung pelaksanaan Program Wisata terdiri dari DEKRANASDA dan Dharma Wanita yang memiliki tugas dan peran sesuai dengan program masing-masing dan berkesesuaian dengan program yang ada di Lorong Wisata. Untuk mendukung tugas keseluruhan di atas maka terbentuk Tim Teknis Lorong Wisata yang dapat dibentuk oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan perannya masing-masing pada program Lorong Wisata. Selain itu, adapula Gugus Tugas yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan, dan/atau

Organisasi Kemasyarakatan. Gugus Tugas dan Tim Teknis ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Gugus Tugas Lorong Wisata bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Lorong Wisata, mengumpulkan data Lorong Wisata, Menyusun prioritas program untuk kegiatan Lorong Wisata, melakukan evaluasi, memonitor, pelaporan kebijakan pelaksanaan Lorong Wisata, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Tim Teknis Lorong Wisata bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Lorong Wisata dibentuk Sekretariat, Sekretariat ini bertugas untuk mengoordinir tiap SKPD, Kecamatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sekretariat Gugus Tugas Lorong Wisata berkedudukan di Dinas Parawisata Kota Makassar. Setiap SKPD terlibat dalam pelaksanaan Pembentukan Lorong Wisata wajib melakukan pembinaan terhadap semua aktivitas/kegiatan terkait dengan Pembentukan Lorong Wisata.

Pembentukan Lorong Wisata ini memiliki pembiayaan yang berasal dari 3 macam sumber. Pertama, APBD yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD, CSR, dan sumber lainnya yang sah. Kedua, bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat. Ketiga, partisipasi dan swadaya masyarakat baik dari domisili Lorong yang akan dijadikan Lorong Wisata maupun

masyarakat atau diluar domisili tersebut. Pembentukan Lorong Wisata per 31 Mei 2023 sudah mencapai 1.846 lorong dari target 5.000 lorong. 1.846 lorong ini sudah tersebar di 15 Kecamatan se Kota Makassar, dari masing-masing kecamatan memberikan wewenang kepada kelurahan untuk membentuk lorong wisatanya, dan masing-masing kecamatan mendapatkan jatah membentuk 7 lorong.

Lorong Wisata mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lorong-lorong lain yang ada di Kota Makassar. Karakteristik itu antara lain, dipenuhi lampu jalan sehingga ketika malam hari lorong ini ada penerangan, adanya CCTV didalam lorong hal ini untuk keamanan dan pemantauan, adanya lukisan-lukisan pada dinding (mural) untuk meningkatkan keindahan lorong, adanya papan informasi untuk memberikan informasi kepada wisatawan yang berkunjung, dan ada gapura selamat datang untuk memberikan kesan yang elegan (Hairuddin, 2023).

B. Kajian tentang Kemiskinan di Kota Makassar

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya

kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Setiadi, 2011).

Menurut Soekanto (2006), kemiskinan di artikan keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Prof. Dr. Emil Salim yang di maksud dengan kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang di lukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya. (Hartomo, 2004)

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat. (Rohmin, 2004)

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, Kemiskinan dapat di golongankan dalam tiga bagian (Setiadi, 2011) :

- a. **Kemiskinan Kultural** adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara yang modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- b. **Kemiskinan Natural** adalah karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya manusia maupun pembangunan. Kemiskinan natural ini merupakan kemiskinan yang di sebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kemiskinan ini merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya ataupun daerah yang terisolasi.
- c. **Kemiskinan Struktural** adalah bentuk kemiskinan yang di sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Melihat kemiskinan sebagai permasalahan mendasar yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk mengubah nasibnya dalam arti meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka pembangunan di bidang perekonomian merupakan salah satu alternatif jawaban yang perlu di pertimbangkan dalam skala prioritas utama. Dalam hal ini

pembangunan ekonomi di maksudkan sebagai kegiatan perekonomian yang secara langsung berhadapan dengan kemiskinan, baik secara individual maupun kemiskinan masyarakat secara umum.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat pesan dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu (Hendry, at. al, 2022).

Ukuran kemiskinan di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang melihat bahwa masyarakat atau orang miskin itu di lihat dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum reguler yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ukuran tersebut, belum bisa di katakan tepat untuk menilai suatu ukuran kemiskinan. Bisa saja dalam

suatu daerah ukuran orang miskin itu di lihat dari tidak sanggupnya dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga. Ini di sebabkan banyaknya tanggungan dan beban hidup yang di beratkan kepada seseorang (Hidaya, 2017).

Masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar cukup kompleks karena beragamnya kondisi sosial masyarakat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda-beda. Meskipun dikatakan bahwa telah dilakukan upaya untuk mencegah kemiskinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati kesejahteraan, terkhusus untuk masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan diberbagai daerah semakin besar dari waktu ke waktu, namun seringkali tidak berbanding lurus dengan *output* pengentasan kemiskinan (Ginting, 2019; Heitzmann & Matzinger, 2020; McWilliam, Wianti, & Taufik, 2021; Panda & Padhi, 2020; Refaeli & Achdut, 2020; Sharaunga & Mudhara, 2021).

Potret yang menggambarkan kemiskinan pada masyarakat Kota Makassar terkhusus yang tinggal didalam lorong adalah, kondisi tempat tinggal masyarakat yang kumuh bahkan sudah tidak layak untuk dihuni. Lorong-lorong yang masyarakat tempati untuk tinggal pun keadaannya sempit, gelap dan kotor. Tumpukan sampah berserakan dimana-mana karena tidak adanya sistem pembuangan sampah yang memadai. Selain itu banyak masyarakat yang tinggal dirumah kecil yang dibangun seadanya dari bahan-bahan bekas seperti seng, kayu, bahkan kardus.

Sanitasi umumnya tidak memadai, listrik yang mereka gunakan juga pas-pasan bahkan ada yang menggunakan secara illegal. Kondisi ini tentu sangat beresiko bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat yang tinggal didalam lorong.

Selain kondisi fisik pemukiman, secara sosial pun masyarakat yang tinggal didalam lorong kurang mendapatkan akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Adanya anak yang putus sekolah dan bekerja membantu orang tua nya. Tingkat pengangguran dan kriminalitas juga tinggi, hubungan sosial antar masyarakat cenderung acuh tak acuh (solidaritas organik) karena sibuk memikirkan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka.

Kemiskinan dan orang miskin sudah dikenal manusia sejak masa lampau. Oleh karena itu sangatlah logis bila kebudayaan manusia dalam kurun waktu tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu merasa tersentuh bila melihat penderitaan orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan, atau paling tidak meringankan nasib yang mereka derita itu.

Kemiskinan yang telah berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang panjang, memastikan bahwa gejala tersebut tidak cukup di terangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya, ia tidak sekedar gejala keterbatasan lapangan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Ia sudah menjadi realitas sistem/struktur dan tata nilai kemasyarakatan. Ia

merupakan suatu realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah kepada keadaan. Tata nilai dan sistem/struktur sosial ekonomi serta perilaku dan kecenderungan aktual yang telah terbiasa dengan kemiskinan ini juga bukan saja menyebabkan mereka yang miskin untuk tetap miskin terhadap kemiskinan itu sendiri. Seperti halnya dengan masyarakat kota Makassar, rata-rata setiap daerah melihat ukuran kemiskinan seorang atau masyarakat yang dianggap miskin itu dengan memperbandingkan penghasilan perbulan dan jumlah tanggungan dalam keluarga (Ningtias dan Aar, 2021).

Apabila hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dianggapnya sebagai orang miskin. Bisa juga melihatnya dari keadaan tempat tinggalnya yang *notebene*, meskipun tinggal di tengah-tengah kota tetapi masih ada saja rumah yang bertembokan bilik, beralas tanah, dan atapnya belum menggunakan genteng. Ini di karenakan masyarakat yang berada pada angka kemiskinan, merupakan masyarakat yang tidak mampu bersaing dalam pembangunan. Maka, terciptalah kantong-kantong kemiskinan di setiap daerah dan sudut kota (Hidaya, 2017).

Pembangunan secara tidak terduga memisahkan masyarakat menjadi dua kelompok yang berbeda tajam dari satu yang lain. Ada satu kelompok yang stabil, kuat ekonominya, terjamin masa depannya. Ada satu kelompok yang tidak stabil, mudah bergeser dari sektor yang lain, cepat berpindah pekerjaan. Kelompok inilah yang di sebut masa apung. Mereka adalah kelompok yang paling besar. Kehidupan ekonominya hanya

berlangsung dari tangan ke mulut, semuanya habis untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar. Kemiskinan di kota Makassar ini merupakan masalah yang sangat penting untuk di atasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dari itu peran pemerintah kota Makassar sangat di perlukan. Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Di kutip dari laman (www.rakyatsulsel.fajar.co.id) angka kemiskinan ekstrem di Kota Makassar tercatat sebanyak 7.836 keluarga. Laporan ini berdasarkan penetapan hasil verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Kota Makassar 2023, yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan selama beberapa bulan terakhir. Dari hasil ini Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Walikota Makassar meminta OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024.

Pemerintah Kota Makassar mengungkapkan ada tiga langkah utama untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar, yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Dari ketiga langkah ini, OPD diharapkan bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus sesuai dengan Program prioritas Pemkot

Makassar yakni semua anak harus sekolah, karena menurutnya anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan, pada bidang kesehatan berfokus pada penanganan stunting, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Pada bidang ekonomi, Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

C. Tinjauan tentang Kebijakan Sosial dalam Perspektif Sosiologi

Istilah 'kebijakan' yang dimaksud disepadankan dengan kata bahasa Inggris '*policy*' yang dibedakan dari kata '*wisdom*' yang berarti 'kebijaksanaan' atau 'kearifan'. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata 'kebijakan' dan kata 'sosial'. (Elistia, 2020)

Menurut Ealau dan Prewitt (dalam Suharto, 1997), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Seperti halnya kata 'kebijakan', kata 'sosial' pun memiliki beragam pengertian. Conyers (dalam Elistia, 2020) mengelompokkan kata sosial ke dalam 5 pengertian :

- 1) Kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kegiatan olahraga, rekreasi, arisan sering disebut sebagai kegiatan sosial.
- 2) Kata sosial diartikan sebagai lawan kata individual. Dalam hal ini kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang (*group*), atau suatu kolektifitas, seperti masyarakat (*society*) warga atau komunitas (*community*).
- 3) Kata sosial sebagai istilah yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Pembangunan sosial berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan.
- 4) Kata sosial sebagai lawan kata ekonomi. Dalam pengertian ini kata sosial berkonotasi dengan aktifitas-aktivitas masyarakat atau organisasi yang bersifat volunter, swakarsa, swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. Organisasi

sosial, seperti Karang Taruna, PKK adalah organisasi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tidak mencari keuntungan yang berupa uang. Ini berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), atau Bank yang tentunya kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi.

- 5) Kata sosial berkaitan dengan hak azasi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Misalnya, setiap orang memiliki hak asasi (*human right*) dan hak sosial (*sosial right*), seperti kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan, kebebasan dalam menyatakan pendapat, atau berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan baik secara luas maupun sempit (Kartasasmita, 1996). Secara luas kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian.

Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang dikategorikan sebagai

kelompok yang tidak beruntung (*disadvantaged group*) dan kelompok rentan (*vulnerable group*) (Elistia, 2020). Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan tuna susila, kenakalan remaja, anak dan jompo terlantar.

Dengan demikian, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Pengertian kebijakan sosial seperti ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial sebagai perencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama kali muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara, sehingga meskipun pengertian perencanaan sosial diintegrasikan secara meluas, di masyarakat Barat berkembang anggapan bahwa perencanaan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perencanaan kesejahteraan sosial (Conyers, 1992).

Kebijakan sosial berasal dari nilai-nilai, kenyataan, dan teori-teori sosial. Oleh karena itu, argumen tentang kebijakan sosial sebagian besar didasarkan pada sosiologi (Reiss dalam Wirata, 2022), sebuah studi tentang realita sosial sebagai suatu entitas. Sosiologi klasik memfokuskan penelitiannya pada pemahaman masyarakat. Namun, dengan perubahan dalam masyarakat, sosiologi yang ada saat ini telah berkembang menjadi studi yang tidak hanya berusaha untuk “memahami realita sosial” tetapi

juga studi dengan tujuan untuk mengeksploitasi pemahaman untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan mempelajari cara masyarakat berinteraksi dan mendapatkan keseimbangan institusional untuk mencapai masyarakat yang ideal. Pendekatan sosiologi ini dikembangkan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah pertanyaan dan masalah yang tidak terpecahkan dalam masyarakat. Oleh karena alasan itulah maka sosiologi kontemporer sangat terkait dengan subjek kesejahteraan sosial.

Studi kebijakan sosial telah dikembangkan oleh para akademisi dan praktisi dari Barat. Studi ini memfokuskan pada “pemecahan masalah sosial” yang berbeda dengan fokus Studi di negara-negara berkembang (Soedjatmoko dalam Wirata 2022). Kebijakan sosial di negara berkembang dianggap mampu memecahkan masalah, tetapi memecahkan masalah bukanlah satu-satunya tujuan. Kebijakan sosial di negara berkembang didesain untuk memecahkan masalah serta untuk melakukan pembangunan sosial. Ketika kita membahas tentang pembangunan, ia paling terkait dengan isu keterbelakangan. Dalam pendekatan klasik, keterbelakangan ekonomi memerlukan pembangunan ekonomi. Tetapi ada keterbelakangan lain, yaitu keterbelakangan sosial yang memerlukan pembangunan sosial. Baik keterbelakangan ekonomi dan sosial adalah keterbelakangan mutlak karena kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju adalah jauh.

Namun, karena keterbelakangan sosial dan ekonomi merupakan keterbelakangan absolut, mereka menarik perhatian dari sebagian besar pembuat kebijakan di negara-negara berkembang. Perpaduan antara keterbelakangan sosial-ekonomi dan tingkat pembangunan di negara-negara berkembang mengakibatkan perbedaan pendekatan kebijakan sosial untuk memasukkan pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah pembangunan ke arah pembangunan manusia, keadilan sosial, dan ke arah kesejahteraan sosial. Pembangunan manusia adalah sebuah konsep pembangunan baru yang merupakan perluasan dari pembangunan ekonomi (Nugroho, 2018).

Pemahaman dasar tentang kebijakan sosial adalah pemahaman tentang kesejahteraan sosial. Ia berhubungan dengan pendidikan masyarakat, perawatan kesehatan, perumahan dan keamanan sosial. Namun demikian, pembangunan sosial di negara-negara berkembang lebih banyak menuntut daripada sekadar kesejahteraan sosial. Pembangunan di negara-negara berkembang akan selalu menciptakan warga negara marginal yaitu mereka yang tidak mempunyai akses terhadap proses perkembangan dan oleh karenanya tertinggal dalam proses pembangunan. Ia mengakibatkan masalah sosial, baik dalam sektor ekonomi dan sosial. Kebijakan sosial diperlukan untuk memecahkan masalah sosial. Permasalahan sosial di negara-negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda (Winata, 2022).

Masalah sosial di negara-negara berkembang berhubungan dengan keadilan sosial. Masalah tersebut adalah tentang ketidaksetaraan dalam hal gender. Ia juga berhubungan dengan masalah pengangguran. Tentang masalah kaum miskin, tentang kaum difabel, tentang diskriminasi, tentang konflik, tentang perdagangan manusia, tentang kriminalitas serta para korbannya. Permasalahan sosial juga menyangkut ketertinggalan dan masyarakat yang terisolasi. Kebijakan sosial di negara-negara berkembang dimulai dari nol, karena “keterbelakangan sosial”, yang berbeda dengan kebijakan sosial di negara maju dengan hanya permasalahan sosial yang ada. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan pemahaman kita bahwa kebijakan sosial di negaranegara berkembang lebih dari hanya kesejahteraan sosial, tetapi juga mencakup pembangunan dan keadilan sosial.

Jadi, kajian kebijakan sosial dalam perspektif sosiologi melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan sosial mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan bagaimana kebijakan sosial mencerminkan dan membentuk dinamika sosial. Ini melibatkan analisis terhadap interaksi antara institusi pemerintah, masyarakat, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

D. Teori yang relevan

Penulis menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis dalam menggambar dan menganalisa. Beberapa teori yang relevan dalam

penelitian ini adalah teori kebijakan sosial dan teori pemberdayaan masyarakat sebab teori ini dinilai dapat membantu menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Adapun teori yang relevan, terurai sebagai berikut :

1. Konsep dan Teori tentang Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan publik mempunyai beberapa macam kebijakan diantaranya yakni, kebijakan pemerintah dan kebijakan sosial. Kebijakan pemerintah menurut Mc Rae dan Wilde adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang, sedangkan kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Bessan, Watts, Dalton dan Smith (dalam Suharto 2020), menyatakan secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Kebijakan pemerintah adalah aturan, regulasi, dan tindakan yang dibuat serta diimplementasikan oleh pemerintah. Contohnya seperti kebijakan pajak, kebijakan subsidi BBM, kebijakan impor beras, dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah biasanya bertujuan untuk mengatur tatanan sosial dan ekonomi di suatu negara. Sementara itu,

kebijakan sosial adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak yatim piatu. Contoh kebijakan sosial antara lain program bantuan sosial, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan subsidi pendidikan (Anggraeni, et al. 2021).

Perbedaan yang paling menonjol dari kedua kebijakan ini adalah bahwa kebijakan pemerintah bersifat makro dan umum, mengatur sistem sosial dan ekonomi secara luas, sedangkan kebijakan sosial lebih bersifat mikro dan khusus, fokus pada kelompok dan masalah sosial tertentu. Selain itu, dampak kebijakan pemerintah bisa dirasakan seluruh masyarakat, sementara kebijakan sosial hanya menysasar kelompok tertentu yang membutuhkan.

Richard Morris Titmuss (1907-1973) adalah tokoh yang paling menonjol dalam perkembangan ilmu ini. Titmuss adalah seorang peneliti dan guru sosial perintis asal Inggris. Ia mendirikan disiplin akademis administrasi sosial (sekarang dikenal di universitas-universitas sebagai kebijakan sosial) dan menjabat sebagai ketua pendiri bidang kebijakan sosial di *London School of Economics*. Titmuss (dalam Nugroho 2018), menyatakan bahwa kebijakan sosial dapat dipahami sebagai administrasi sosial, pelayanan sosial, kesejahteraan sosial, keamanan sosial, dan negara kesejahteraan. Titmuss menyebutkan bahwa kebijakan adalah prinsip yang mengatur

tindakan dengan tujuan tertentu seperti yang dinyatakannya bahwa konsep kebijakan hanya bermakna jika kita yakin bahwa kita dapat mengubah dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, Titmuss menyatakan bahwa, kita tidak dapat mengubah cuaca karena kebijakan adalah tindakan yang berorientasi kata.

Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya melalui pengorganisasia dan/atau penyediaan pelayanan sosial, jaminan sosial dan program-program penunjang lainnya (Izudin, 2022). Untuk menunjang itu semua, wujud kebijakan sosial dapat berupa :

1. Peraturan dan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
2. Program pelayanan sosial, sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, dan pendampingan).
3. Sistem perpajakan, dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrument kebijakan yang bertujuan

langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil dan merata.

Maka dari itu, perwujudan kebijakan sosial ini dapat digambarkan kedalam jenis-jenis kebijakan (Izudin, 2022), yakni (1) Income maintenance, membuka kesempatan yang variatif dan dinamis tentang makna kerja dan kontribusi sosial bagi kehidupan masyarakat; (2) Pendidikan, pendidikan alternatif, beasiswa, laon yang dibayar setelah lulus atau dapat kerja, *lunch program*, *school sosial work*, *outreach education*. Peran kebijakan sosial sebagai faktor pendorong mewujudkan pendidikan yang merata dan mudah diakses, sementara Dinas Pendidikan fokus di substansi pendidikan seperti kurikulum, dan kualitas SDM; (3) Kesehatan, sistem perawatan kesehatan yang tidak hanya "*free for service*", asuransi kesehatan, *medical sosial work*, namun fokus pada *health care* yang paling substansial.

Sebagai suatu kinerja, kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi hasil-hasil pengimplementasian produk kebijakan sosial atau pencapaian tujuan suatu rencana pembangunan. Kebijakan sosial dalam pengertian ini menyanhkut kegiatan analisis untuk melihat dampak positif maupun negative, sebagai akibat dari diterapkannya suatu program. Secara khusus, dimensi kebijakan sosial ini seringkali diistilahkan dengan analisis kebijakan sosial (Duun, Quade dalam Suharto, 2005). Analisis kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis akurat mengenai konsekuensi

kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan diimplementasikan (Suharto, 2004). Menurut Duun (dalam Suharto, 2005) ada tiga model analisis kebijakan yaitu :

1. Model Prospektif

Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi kebijakan “sebelum” suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*).

2. Model Retrospektif

Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat kebijakan “setelah” suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluatif terhadap dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3. Model Integratif

Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistic, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik “sebelum” maupun “sesudah” suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melihat Teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Kebijakan sosial sangat penting untuk dibahas dalam program pemerintah karena memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan

sosial, keadilan, dan stabilitas masyarakat. Kebijakan sosial menjadi kunci dalam upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, stabil, dan sejahtera. Oleh karena itu, pembahasan dan implementasi kebijakan sosial yang baik sangat penting dalam program pemerintah.

2. Teori Pemberdayaan dan Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice (1997)*, Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Dalam buku *Pengembangan Masyarakat* karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari empat perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.

1. Perspektif Pluralis

Perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam

perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

2. Perspektif Elitis

Perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

3. Perspektif Strukturalis

Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

4. Perspektif Post-strukturalis

Perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis.

Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat. Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah:

1. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

2. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka (Theresia et al., 2015: 197). Partisipasi masyarakat sering diidentifikasi sebagai faktor penting dalam proses pembangunan berkelanjutan (Wanarat & Nuaan, 2013: 680), termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang tinggal di daerah itu sebagai subjek sekaligus objek yang akan diperbaiki mutu hidupnya (Theresia et al., 2015: 206-207).

Ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat (Soetrisno, 1995: 221-222). Definisi pertama mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap

rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Definisi ini mempunyai motto yang berbunyi "*Silakan Anda (rakyat) berpartisipasi, tetapi pemerintah yang merencanakan*". Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Secara sosiologis, definisi ini tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi, melainkan mobilisasi. Definisi kedua adalah definisi universal dari partisipasi, yaitu kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan, sehingga diasumsikan bahwa sasaran program mempunyai aspirasi dan nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan.

Partisipasi memiliki definisi yang berbeda-beda, di antaranya adalah pengaruh masyarakat, pembagian kontrol, dan penguasaan penuh (Mulyadi, 2009: 20). Hal ini menyebabkan munculnya berbagai tingkat partisipasi. Ivo Imparato dan Jeff Ruster (2003: 4) mengidentifikasi lima bentuk partisipasi, yaitu tidak berpartisipasi; partisipasi informatif atau tidak langsung; partisipasi konsultatif; pembagian kekuasaan; dan kekuasaan penuh. Sedangkan Riza Primahendra (dalam Zubaedi, 2013) membagi tujuh bentuk partisipasi, yaitu:

- a) Partisipasi pasif yang ditandai dengan kehadiran masyarakat, namun mereka tidak memiliki pengaruh dan kontrol atau dilibatkan namun hanya sebagai massa, peserta atau partisipan dari suatu kegiatan.
- b) Partisipasi atas nama/manipulative yang ditandai dengan tidak adanya informasi yang diperoleh masyarakat yang tinggal di daerah kawasan miskin. Pertukaran informasi hanya terbatas di kalangan profesional saja (satu arah).
- c) Partisipasi konsultatif. Masyarakat miskin berpartisipasi hanya dengan berkonsultasi kepada ahli, dan para ahli tidak berkewajiban untuk mengajukan masukan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu tidak ada peluang bagi masyarakat miskin dalam pembuatan keputusan bersama, atau menjadikan masyarakat sebagai subyek konsultasi dari ide kegiatan tertentu keputusan mengenai bentuk dan isi kegiatan bukan oleh masyarakat tetapi oleh pelaksana.
- d) Partisipasi insentif. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan jasa/pengorbanan untuk memperoleh imbalan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah insentif dihentikan.
- e) Partisipasi fungsional. Partisipasi dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan, khususnya untuk mengurangi biaya. Masyarakat membentuk kelompok setelah ada keputusan yang disepakati. Partisipasi masyarakat mungkin bersifat interaktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, tetapi cenderung muncul hanya

setelah keputusan yang besar dibuat oleh pihak luar atau partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan di mana persyaratan dan kondisi-kondisinya telah ditetapkan dalam suatu kerangka kerja atau kontrak.

- f) Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
- g) *Self-mobilization* (mandiri). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang digunakan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat memperkaya kajian keilmuan dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan Hardianti Hafid, dkk (2023) yang berfokus pada pendampingan pembuatan nomor induk berusaha sebagai pendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lorong wisata. Penelitian ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian untuk mengkaji pentingnya pendampingan dalam proses pembuatan NIB

sebagai upaya untuk mendukung pengembangan UMKM di Lorong Wisata Kota Makassar. Pendampingan ini membantu UMKM mengatasi kendala administratif yang seringkali menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha mereka. Adanya pendampingan, UMKM dapat memperoleh NIB dengan lebih mudah, meningkatkan kepercayaan diri, dan memahami lebih baik tentang regulasi yang berlaku. Hal ini membantu UMKM beroperasi secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Asrianto, dkk (2023) yang berfokus pada perubahan sosial di Kelurahan Tello Baru melalui program lorong wisata. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara agen dan struktur dalam menciptakan perubahan sosial di Kelurahan Tello Baru dan menjadi ekowisata melalui program lorong wisata. Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Tello Baru dengan transformasinya menjadi destinasi ekowisata melalui program Lorong Wisata merupakan sebuah proses yang berjalan dalam kerangka praktik sosial, agen, dan struktur. Transformasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan sosial individu (*agen*) tetapi juga oleh kebijakan dan dukungan struktural dari Pemerintah Kota Makassar. Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Tello Baru menuju ekowisata mencerminkan hasil dari interaksi yang kompleks antara agen perubahan dan struktur sosial, yang terjalin dengan dinamika khusus dalam ruang dan waktu tertentu. Meskipun Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi ini, agen perubahan tetap mendominasi dalam arah, pengelolaan, dan

pengembangan Kelurahan Tello Baru sebagai destinasi ekowisata unggulan.

Selanjutnya penelitian oleh Kusuma Wulandari, dkk (2022) yang berfokus pengembangan parawisata dan pengentasan kemiskinan di desa Glingseran. Kajian ini menjelaskan bahwa manfaat desa wisata adalah melepaskan desa Glingseran dari kemiskinan atau dari kategori desa miskin. Indikator desa Glingseran lepas dari Kemiskinan yaitu infrastruktur desa sudah bagus, tingkat ekonomi masyarakat relatif baik dengan ditandai sudah tidak ada masyarakat yang memakan gaplek. Desa wisata memberikan pekerjaan bagi masyarakat desa terutama dibidang parkir sepeda. masyarakat disekitar desa wisata untuk berjualan. Pada saat ini Kegiatan desa wisata pada tahapan pembangunan sehingga banyak pembangunan yang dilakukan di tempat wisata misalnya saluran, plengsengan sungai, perbaikan jalan sehingga dapat menyerap tenaga kerja untuk bekerja di bidang bangunan.

Tabel 2.1 Matrix Penelitian Terdahulu yang terkait dengan penelitian

No	Tokoh (Tahun)	Kajian	Temuan dan Indikasi
1	Hardianti Hafid, dkk (2023)	Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Lorong Wisata	Pentingnya pendampingan dalam proses pembuatan NIB sebagai upaya untuk mendukung pengembangan UMKM di Lorong Wisata Kota Makassar. Pendampingan ini membantu UMKM mengatasi kendala administratif yang seringkali menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha mereka. Adanya pendampingan, UMKM dapat

			memperoleh NIB dengan lebih mudah, meningkatkan kepercayaan diri, dan memahami lebih baik tentang regulasi yang berlaku. Hal ini membantu UMKM beroperasi secara lebih profesional dan berkelanjutan.
2	Asrianto, dkk (2023)	Perubahan sosial di Kelurahan Tello Baru melalui program lorong wisata	Kajian ini menjelaskan bahwa betul adanya relasi antara agen dan struktur dalam perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Tello Baru. Bertransformasinya menjadi destinasi ekowisata melalui program Lorong Wisata merupakan sebuah proses yang berjalan dalam kerangka praktik sosial, agen, dan struktur. Transformasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan sosial individu (<i>agen</i>) tetapi juga oleh kebijakan dan dukungan struktural dari Pemerintah Kota Makassar.
3	Kusuma Wulandari, dkk (2022)	Pengembangan Parawisata dan Pengentasan Kemiskinan di Desa Glingseran	Kajian ini menjelaskan bahwa manfaat desa wisata adalah melepaskan desa Glingseran dari kemiskinan atau dari kategori desa miskin. Indikator desa Glingseran lepas dari Kemiskinan yaitu infrastruktur desa sudah bagus, tingkat ekonomi masyarakat relatif baik dengan ditandai sudah tidak ada masyarakat yang memakan gaplek. Desa wisata memberikan pekerjaan bagi masyarakat desa terutama dibidang parkir sepeda. masyarakat disekitar desa wisata untuk berjualan. Pada saat ini Kegiatan desa wisata pada tahapan pembangunan sehingga banyak pembangunan

			yang dilakukan di tempat wisata misalnya saluran, plengsengan sungai, perbaikan jalan sehingga dapat menyerap tenaga kerja untuk bekerja di bidang bangunan.
--	--	--	--

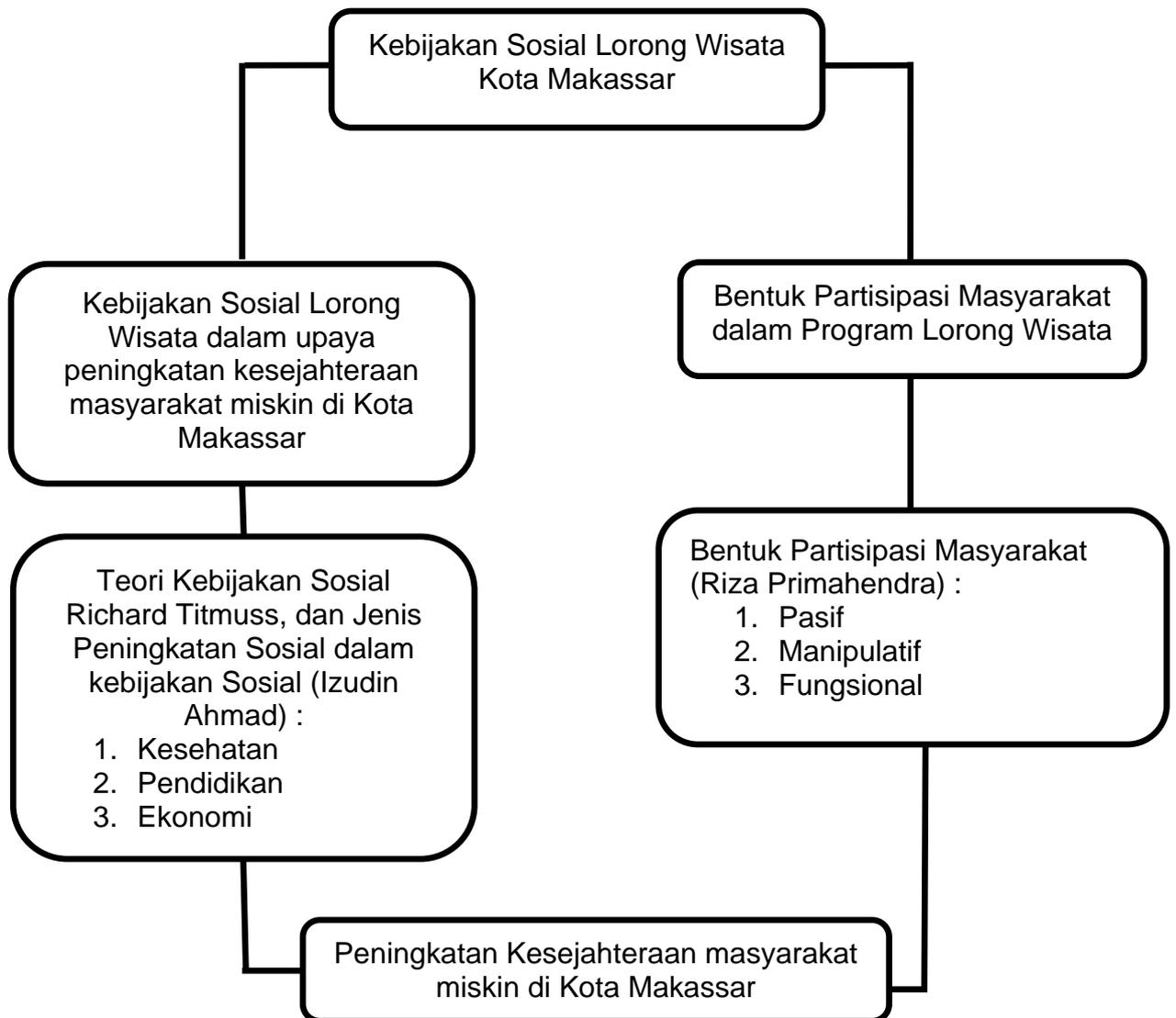
F. Kerangka Pikir

Penggambaran kerangka pikir kebijakan sosial pada Program Lorong Wisata sebagaimana dibahas dalam poin-poin sebelumnya untuk memudahkan sudut pandang, jalannya analisa, hingga gambaran umum dalam sebuah skema penelitian. Kerangka ini dijadikan sebagai peta konsep atau alur berpikir yang digunakan pada saat proses penelitian di lapangan. Alur berpikir ini juga menunjukkan secara keseluruhan arah dari peneliti.

Program Lorong Wisata di Kota Makassar menekankan pada daerah kunjungan wisata yang memiliki infrastruktur yang baik, lingkungan asri, indah, bersih, hijau, dan menarik serta terdapat perputaran ekonomi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian warga tersebut. Program ini merupakan bentuk program *top-down* yang dimana pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat sebagai upaya menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat.

Mengingat pentingnya kita untuk melihat apakah program yang diberikan pemerintah memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, maka dari itu perlunya untuk mengetahui, menganalisa dan mengamati tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari

itu, kebijakan sosial sangat perlu untuk diteliti. Teori kebijakan Sosial dari Richard Titmuss akan menjadi pisau analisis dalam kajian ini serta konsep-konsep partisipasi masyarakat memberikan gambaran seperti apa bentuk partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan kerangka pikir berikut ini:



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir